

**PANDANGAN ORGANISASI MASYARAKAT NAHDLATUL
ULAMA TERHADAP WACANA PEMIMPIN NON-MUSLIM**

(Studi Pandangan dari Tokoh PWNU dan PW GP Ansor Jawa Timur)

Skripsi:

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh :

NOVYA DANA ROKHMANA

E04213079

JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novya Dana Rokhmana

NIM : E04213079

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Novya Dana Rokhmana
E04213079

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Novya Dana Rokhmana* ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2017

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Dr. Muhd, M. Ag

NIP. 195310021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. H. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M.Ag

NIP. 197206252005011007

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si

NIP. 198202102009011007

Penguji 1,

Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si

NIP. 196811291996031003

Penguji 2,

Zaky Ismail, M.Si

NIP. 198212302011011007

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

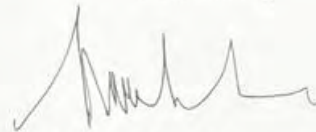
Nama : Novya Dana Rokhmana

NIM : E04213079

Judul : PANDANGAN ORGANISASI MASYARAKAT NAHDLATUL
ULAMA TERHADAP WACANA PEMIMPIN NON-MUSLIM
(Studi Pandangan dari Tokoh PWNU dan PW GP Ansor Jawa
Timur)

Jombang, 20 Juli 2017

Pembimbing



Dr. H. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M.Ag
NIP. 197206252005011007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novya Dana Rokhmana
NIM : E04213079
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Filsafat Politik Islam
E-mail address : novyadana7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PANDANGAN ORGANISASI MASYARAKAT NAHDLATUL ULAMA TERHADAP

WACANA PEMIMPIN NON-MUSLIM (STUDI PANDANGAN DARI TOKOH PWNU

DAN PW GP ANSOR JAWA TIMUR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Agustus 2017

Penulis

(NOVYA DANA ROKHMANA)

menyatakan bahwa kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Maka dari itu ada beberapa agama yang diakui dan di peluk penduduk Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong huchu.³ Di Indonesia sendiri penduduknya mayoritas adalah pemeluk agama Islam, dengan prosentase 87,2% dari 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia, selebihnya 6,9% protestan, 2,9 katolik, 1,69% Hindu, 0,7% Buddha, dan 0,5% Kong Hu Cu.⁴

Tingkat keberagaman yang tinggi di Indonesia ini memungkinkan adanya kekuasaan dalam pemerintahan yang dijabat oleh seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia pastilah mempunyai keyakinan yang dianut warganya dalam memilih seorang pemimpin. Sebagai seorang warga yang beragama maka pasti akan mempunyai kecenderungan mengikuti kepercayaan dan syari'at dari agama yang dipeluk. Begitupun dengan muslim di Indonesia.

Seorang pemimpin mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yakni sebagai pemandu rakyat, apalagi rakyat/masyarakat yang bersifat heterogen, dimana tidak menutup kemungkinan dalam proses interaksi sosialnya terdapat perbedaan pendapat,

³Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, [Http://E-Dokumen.Kemenag.Go.Id/Files/3wslxrag1286178904.Pdf](http://E-Dokumen.Kemenag.Go.Id/Files/3wslxrag1286178904.Pdf) (Minggu, 28 Mei 2017, 18.30)

⁴Badan Pusat Statistik, Data Statistik Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&tid=321&search-wilayah=Indonesia&wid=0000000000&lang=id> (Minggu, 28 Mei 2017, 20.32)

Dewasa ini, perdebatan perihal boleh atau tidaknya non-Muslim menjadi seorang pemimpin kian menjadi persoalan yang pelik dan membingungkan bagi masyarakat muslim Indonesia. Seperti halnya kontroversi yang terjadi saat ini, ketika Basuki Tjahaja Purnama muncul kembali sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta, masyarakat mulai memperdebatkan lagi tentang boleh tidaknya non-Muslim menjadi seorang pemimpin.

Kontroversi ini memunculkan adanya pihak pro dan kontra tentang pencalonan Ahok, pihak yang pro Ahok seperti halnya pendukungnya tetaplah mendukung pencalonan Ahok sebagai Gubernur, berbeda dengan pihak yang kontra seperti halnya FPI, HTI dan ormas lainnya yang tidak setuju dan menentang Ahok.¹⁰ Adapun organisasi FPI, organisasi kemasyarakatan ini merasa keberatan karena melihat dari agamanya yang berbeda dengan mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia, yakni agama Islam. Saksi ahli agama Islam dari PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, juga menegaskan bahwa larangan Islam memilih pemimpin non-Muslim itu tidak melanggar konstitusi negara di Indonesia karena larangan itu hanya berlaku untuk menganut agama Islam saja.¹¹ Seiring

¹⁰Aries Setiawan, Alasan FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur Jakarta, metro viva <http://m.viva.co.id/berita/metro/541332-alasan-fpi-tolak-ahok-jadi-gubernur-jakarta> (Kamis, 1 Juni 2017, 07:45)

¹¹ Budriyanto, Orang Islam Dilarang Pilih Pemimpin Non-Muslim, PP Muhammadiyah: Tak Langgar Konstitusi. <http://news.okezone.com/read/2017/02/21/337/1624330/orang-islam-dilarang-pilih-pemimpin-non-muslim-pp-muhamadiyah-tak-langgar-konstitusi> (diakses pada 13 Juni 2013, 07:05)

hak pribadi masing-masing, akan tetapi beliau menghimbau agar berfikir ulang. Beliau pun mengungkapkan perasaannya bahwa KH. Ma'ruf Amin telah menyampaikan hasil Mukhtamar NU pada tahun 1999 yang melarang warga NU memilih pemimpin non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat. dan hal tersebut merupakan suatu penegasan dari tokoh NU yang seharusnya diikuti oleh seluruh warga Nahdliyin.¹³

Dari masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memilih judul “Pandangan Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Terhadap Wacana Pemimpin Non-Muslim”. Peneliti ingin lebih memahami bagaimana pandangan tokoh NU tentang wacana pemimpin non-Muslim, sebagaimana NU adalah organisasi masyarakat yang mempunyai basis pengikut paling banyak di Indonesia dan merupakan salah satu ormas yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan berbagai keputusan sosial, politik, ekonomi, dan kenegaraan.

Dalam penelitian ini terdapat 2 struktur organisasi dalam wadah NU yang peneliti pilih, yaitu PWNU dan PW GP Ansor. Peneliti memilih PWNU Jawa Timur dan PW GP Ansor Jawa Timur, karena melihat dari sejarah lahir dan berdirinya NU sendiri adalah di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, selain itu adalah karena wacana pemimpin non-Muslim ini mendapat beberapa tanggapan dari tokoh-tokoh agama dari Jawa Timur terutama dari tokoh NU.

¹³ Mukhtar Bagus, “Gus Sholah: Bagi Warga Jakarta yang Memilih Ahok, Pikir Ulang” <http://news.okezone.com/read/2017/02/03/337/1609170/gus-sholah-bagi-warga-jakarta-yang-memilih-ahok-pikir-ulang> (Jum’at, 30 Juni 2017, 07:22)

merupakan organisasi yang mempunyai basis pengikut paling banyak di Indonesia. Dan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya kepada PWNU Jawa Timur dan GP Ansor Jawa Timur, dan khususnya tokoh-tokoh dari kedua lembaga tersebut.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dengan judul “Wacana Pemimpin Non-Muslim dalam Organisasi Masyarakat NU”. Karena penelitian terdahulu juga meneliti tentang persoalan pemimpin non muslim. Beberapa penelitian yang relevan tersebut diantaranya:

1. Wahyu Naldi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Penafsiran terhadap Ayat-Ayat Larangan memilih pemimpin non-muslim dalam Al-Qur’an; Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb”. Dalam penelitiannya tersebut dikatakan bahwa menurut Quraish Shihab bahwa jika tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian dari pengambilan itu (jabatan itu) maka boleh menjadikan Non-muslim sebagai wali. Sedangkan menurut Sayyid Quthb, dengan tegas tidak memperbolehkan memilih pemimpin Non-muslim, dan secara tidak langsung telah keluar dari Islam jika memilih orang Non-muslim sebagai wali. Kecuali karena hanya memelihara diri (taqiyyah). Dan menurut Wahyu Naldi selaku peneliti, menganggap bahwa penafsiran Quraish yang lebih relevan dengan konteks Indonesia yang masyarakatnya bersifat majemuk dan plural, yang mana bertumpu pada ideologi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kepemimpinan

1. Definisi Kepemimpinan

Kata kepemimpinan berasal dari kata dasar yaitu “pimpin”. Dari kata dasar ini, lahir beberapa istilah antara lain: pemimpin, (yaitu orang yang memimpin), kepemimpinan (yaitu gaya atau sifat seorang pemimpin), pemimpinan (kelompok pemimpin), terpimpin (orang yang dipimpin atau pengikut), dan keterpimpinan (sifat orang yang dipimpin).¹

Menurut Soerjono Soekanto kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut, maka kepemimpinan diartikan sebagai cara untuk memimpin. Dalam sebuah Negara melahirkan kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik itu terdiri dari tokoh-tokoh politik, para pemimpin partai puncak pemimpin eksekutif, dan puncak pemimpin militer, yang naik turun berdasarkan karier.²

¹ Mohammad Ali Aziz, *Kepemimpinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Harkat Media, 2009), 1.

² Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Edisi Ketiga)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 12.

Menurut Akbar Tanjung, pemimpin merupakan pemandu sekaligus panutan bagi yang dipimpin. Ketiadaan pemimpin membuat masyarakat menjadi kacau, berseteru satu sama lain. Kehadiran pemimpin amat diperlukan untuk mempersatukan berbagai potensi konflik yang ada, dalam bingkai kebersamaan sehingga menjadi suatu kekuatan yang diperhitungkan.³

2. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam

Dalam Islam, yakni pandangan Ibnu Taimiyah, seorang pemimpin biasa disebut dengan ‘Ulul-amri’, yakni para pemegang urusan dan penguasanya. Mereka adalah yang mempunyai wewenang memerintahkan manusia.⁴ Yang termasuk dalam ulul-amri adalah para pemegang kekuasaan, para ilmuwan, dan para filosof. Maka dari itu ulil-amri terdiri atas dua golongan, yaitu ulama dan umara. Setiap orang yang diikuti orang adalah ulul-amri, dan mereka wajib memerintahkan apa yang diperintahkan Allah dan melarang apa yang telah dilarang-Nya. Jadi wajib untuk mentaati ulil-amri dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak mentaati mereka jika dalam kemaksiatan kepada Allah.⁵

³ Akbar Tandjung, “Kepemimpinan Politik Yang Negarawan”, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=728 (Rabu, 10 Juli 2017, 11:24)

⁴ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1985), 168.

⁵ Ibid, 169.

Adapun Ulil Amri merupakan penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah SWT, maka menjadi sesuatu yang jelas bahwa yang pertama kali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan (kepada Allah, Rasul, dan rukun iman yang lainnya). Tanpa keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya mustahil dia akan memimpin umat menempuh jalan Allah.⁶ Dengan demikian, pemimpin dalam Islam adalah yang mengatur segala keperluan masyarakat berlandaskan syariat dari segala urusan dunia dan akhirat dalam rangka menjaga agama dan segala prinsip-prinsipnya.

Dalam Islam, mengangkat seorang pemimpin adalah suatu keharusan, adapun hadits Nabi S.A.W memerintahkan untuk mengangkat pemimpin ketika bersafar atau melakukan perjalanan:⁷

إِذَا كَانَتْ لَكَ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةٌ مَّرُّوا أَحَدًا مِنْهُمْ

“Jika ada tiga orang keluar untuk bersafar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu diantaranya sebagai ketua rombongan”

Dalam pandangan Al-Mawardi pengangkatan Imam atau pemimpin berdasarkan syariat adalah wajib, karena Imam (khalifah) bertugas

⁶ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam, 1999), hal. 248.

⁷ Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 128.

mengurusi urusan-urusan agama. Syariat menghendaki bahwa segala hak dan persoalan haruslah diberikan kepada pihak atau seseorang yang berwenang dalam agama. Maka menurut Imam Al-Mawardi, status wajibnya imamah adalah *fardhu kifayah* seperti halnya jihad dan mencari ilmu.⁸ Dalam pandangan Al-Mawardi, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk menciptakan kemaslahatan tersebut adalah negara. Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam memilih kepala negara, Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *Ahl al-Ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan *Ahl al-Imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara.⁹ Unsur pertama (*Ahl al-Ikhtiyar*) harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara.¹⁰ Adapun terhadap unsur yang kedua yakni *Ahl al-Imamah*,

⁸ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), 2.

⁹ Rahmad Yulianto, *Pemikiran Politik Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang Konsep Khilafah: Jurnal Islamedia*, Vol. 15 No. 01, (Surabaya : Lemlit UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 68.

¹⁰ Mohammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010), 19.

menurut Al-Mawardi terdapat tujuh kriteria yang harus dimiliki oleh seorang imam, diantaranya:¹¹

- a. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus atau hukum-hukum.
- c. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang digunakan untuk menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
- f. Berani dan kesatria, sehingga mampu melindungi wilayah negara, dan melawan musuh.
- g. Nasab, yakni berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma para ulama.

Dalam pandangan Al-Mawardi, sebagaimana tugas dari *Ahl al-Aqdi wa Al-Hal* dalam menentukan dan memilih imam, mereka harus mempelajari kriteria-kriteria *Imamah* (kepemimpinan).¹² Mereka harus memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak

¹¹ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), 3.

¹² Ibid, 6.

kelebihannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati oleh rakyat, yang paling ahli berijtihad dan layak dipilih, dan mereka tidak menolak membaiaatnya. Jika yang terpilih menolak, maka tidak dibolehkan untuk memaksakannya menerima jabatan imam, karena *Imamah* adalah akad atas dasar kerelaan.¹³

Kriteria selanjutnya yang dijelaskan oleh Al-Mawardi adalah apabila terdapat dua orang yang memenuhi kriteria, maka yang dipilih adalah yang lebih tua, meskipun usia bukan termasuk dalam kriteria.¹⁴ Akan tetapi sah juga jika yang dipilih adalah calon yang paling muda diantara keduanya. Dan jika ada satu calon yang lebih pandai dan sedangkan satunya lebih berani, maka dipilih siapa yang lebih tepat pada zaman tersebut. Jika zaman tersebut dibutuhkan keberanian, seperti halnya karena adanya usaha melepaskan diri dari pemberontak atau semacamnya, maka yang diperlukan pada waktu itu adalah calon yang pemberani.

Menurut Al-Mawardi penguasa adalah pelindung negara. Dialah yang melindungi agama dari pendapat-pendapat sesat yang merusak kemurnian agama, mencegah muslim dari kemurtadan dan melindunginya dari kemungkaran. Maka bagi Al-Mawardi wajib bagi hukumnya bagi umat Islam mengangkat penguasa yang berwibawa dan tokoh agama sekaligus.

¹³ Ibid, 6.

¹⁴ Ibid, 7.

Dengan demikian, agama mendapat perlindungan dari kekuasaan dan kekuasaan kepala negara pun berjalan diatas jalur agama.¹⁵

Menurut Al-Mawardi, kekuasaan itu dibagi dua, yaitu *tafwidh* dan *tanfidz*.

- a. *Tafwidh* adalah pembantu imam (khalifah) yang di angkat oleh imam untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri.¹⁶ Kuasa *tafwidh* memiliki cakupan kerja penanganan hukum dan analisa berbagai kezaliman, menggerakkan tentara dan mengatur strategi perang, mengatur anggaran, regulasi, dan legislasi.¹⁷ Adanya *tafwidh* ini karena tugas penanganan semua persoalan ummat itu tidak mungkin bisa dilakukan semuanya oleh imam (khalifah) tanpa “pembantu”.

Untuk menjadi *tafwidh* haruslah mempunyai kriteria seperti kriteria-kriteria menjadi imam, kecuali nasab. Karena seorang *tafwidh* (menteri) adalah pelaksana gagasan dan ijtihad, ia harus mempunyai sifat-sifat mujtahid. Adapun kriteria-kriteria lain dalam *tafwidh* diluar kriteria seorang imam, yakni ia harus mempunyai keahlian terhadap tugas yang dibebankan, seperti urusan

¹⁵ Ibid, 20.

¹⁶ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), 37.

¹⁷ “Memilih Pemimpin Non-Muslim, Bolehkah?”

<http://www.nu.or.id/post/read/63567/memilih-pemimpin-non-muslim-bolehkah> (Kamis, 29 Juni 2017, 09:40)

perang dan pajak. Ia harus mengerti dengan detail. Karena ia sekali waktu terjun langsung menanganinya, dan sekali waktu menugaskan orang lain.

Jika kriteria-kriteria diatas bukan termasuk kriteria-kriteria agama, ia adalah kriteria-kriteria politik yang sejalan dengan kriteria-kriteria agama, karena kriteria tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi umat, dan menjamin keutuhan agama.¹⁸

b. Tanfidzi (Pelaksana)

Tanfidzi (pelaksana) adalah sebuah jabatan sebagai mediator antara rakyat dan pejabat. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan imam (kholifah), merealisasikan apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya, memberitahukan pengangkatan pejabat dan penyiapan pasukan, dan melaporkan kejadian kejadian penting dan aktual kepada imam, agar ia bisa menanganinya sesuai dengan petunjuk.¹⁹

Kriteria-kriteria yang harus ada pada seorang tanfidzi diantaranya:

- 1) Amanah. Ia tidak berhianat terhadap apa yang diamanahkan kepadanya, dan tidak menipu jika dimintai nasihat.

¹⁸ Ibid, 38.

¹⁹ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), 45.

- 2) Benar ucapannya hingga ia mempercayai informasi yang ia sampaikan dan orang meninggalkan apa yang dilarang kepadanya berdasarkan informasinya.
- 3) Sedikit keinginannya kepada dunia sehingga ia tidak termakan oleh suap, tidak tertipu dan tidak sembrono.
- 4) Tidak mempunyai permusuhan dan pecekokan dengan manusia.
- 5) Membuat laporan kepada imam dan memberitahukan laporannya yang ia dapatkan dari imam.
- 6) Cerdas. Ia mampu melihat persoalan dengan jelas.
- 7) Ia termasuk orang-orang yang tidak menuruti hawa nafsunya.

Adapun perbedaan antara *tafwidzi* dengan *tanfidzi* yaitu *Ahlu Dzimmah* (orang kafir yang berada pada jaminan keamanan negara Islam dengan membayar jizyah) tidak dilarang menjabat sebagai menteri kecuali jika mereka membuat onar dan akibatnya mereka dilarang menjabat menteri karena perbuatan onarnya tersebut.

Perbedaan syarat-syarat diantara keduanya yaitu; kemerdekaan (bukan budak) termasuk persyaratan yang harus dimiliki *tafwidzi* tetapi bukan untuk *tanfidzi*. Syarat agama Islam merupakan keharusan untuk seorang menteri *tafwidzi* tapi tidak harus dipenuhi menteri *tanfidzi*. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i termasuk syarat

yang harus dipenuhi oleh menteri tafwidzi, akan tetapi bukan untuk *tanfidzi*.

3. Syarat-Syarat Seorang Pemimpin

Dalam memilih seorang pemimpin, kriteria utama melihat efektivitas kepemimpinan seseorang salah satunya dilihat dari kemampuan dalam mengambil keputusan.²⁰ Kemampuan mengambil keputusan bukan diukur dengan ukuran kuantitatif atau banyaknya, akan tetapi jumlah putusan yang diambil yang bersifat praktis, realistik dan dapat dilaksanakan serta memperlancar usaha pencapaian tujuan organisasi. Adapun pendekatan yang lumrah digunakan untuk menilai kemampuan seseorang mengambil keputusan yang efektif ialah dengan memenuhi lima persyaratan, yaitu:²¹

- a. Kualitatif, dalam artian mutu keputusan yang diambil.
- b. Ketepatan model pengambilan keputusan yang dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.
- c. Ketepatan teknik pengambilan keputusan yang digunakan sesuai dengan sifat permasalahan yang ingin dipcahkan atau sasaran yang ingin dicapai.

²⁰ Sondang Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. (Jakarta : Aneka Cipta, 1991), 12.

²¹ Ibid, 47

- d. Penerimaan para pelaksana keputusan tersebut sedemikian rupa sehingga keputusan yang diambil telaksana menurut jiwa dan semangat keputusan tersebut tanpa diwarnai oleh persepsi dan interpretasi yang subyektif dari para pelaksana. terbukti mendekati organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Dalam agama Islam, seorang pemimpin adalah yang meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad S.A.W yang sangat mulia, yang harus ditiru dalam kepemimpinan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sifat yang dimaksud dikenal dengan sebutan sifat wajib Rasul, yang artinya pencerminan karakter Nabi Muhammad S.A.W. dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut.²²

- a. Shiddiq.

Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar, karena Nabi Muhammad bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah S.W.T. dengan adil dan jujur. Kata-kata beliau selalu konsisten, tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan.

²² Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22 No. 33 (Januari-Juni, 2016), 38.

b. Amanah

Karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagaimana yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Pemimpin yang amanah yakni benar-benar bertanggung jawab pada amanah, tugas, dan kepercayaan yang diberikan Allah S.W.T. Sifat Amanah yang ada pada diri Rasulullah membuktikan bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan, tanpa ditahan-tahan, diubah, ditambahi maupun dikurangi²³.

c. Tabligh

Sifat ini adalah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar untuk kepentingan umat dan agama. Beliau selalu menyampaikan informasi tanpa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Beliau selalu menyampaikan kebenaran apapun konsekuensinya. Sikap ini mencerminkan sikap keterbukaan (transparansi) dalam kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu dihadapan orang lain.

d. Fathanah

Fathanah adalah sifat Rasul yaitu akal yang panjang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin yang cerdas

²³ Ibid, 39.

dan mengetahui dengan jelas akar permasalahan yang dihadapi dan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umat.

Menurut beberapa ulama, kriteria seorang pemimpin ideal, adalah dengan beberapa karakter berikut, yaitu :

1. Memiliki unsur-unsur kepemimpinan secara sempurna, seperti : Muslim, laki-laki, merdeka, balig dan berakal.
2. Memiliki pengetahuan untuk mengatur persoalan-persoalan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Mencintai kejujuran.
4. Mempunyai keberanian.
5. Mampu berlaku adil.
6. Berjiwa besar.
7. Sempurna secara fisik.
8. Berjiwa besar.

4. Konsep Hak-Hak Non-Muslim Dalam Islam

Adapun agama Islam juga mengatur hak-hak non-Muslim dalam hal politik. Yang dimaksud politik dalam kajian ini adalah hal-hal yang menyangkut kepemimpinan dan jabatan dalam pemerintahan.²⁴ Menurut

²⁴ Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), 123.

Rasyid Ridla berpendapat bahwa *ulu al-amr* adalah orang-orang yang menjadi panutan masyarakat dalam berbagai kepentingan umum, seperti pejabat pemerintahan, hakim, ulama, komandan tentara, dan sebagainya.²⁵

Menurut Rasyid Ridla, tugas seorang pemimpin adalah menjamin dan menjaga terlaksanakannya hukum Allah, maka pemimpin kaum Muslimin itu haruslah seorang Muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak dibenarkan mengangkat seorang non-Muslim untuk menjadi pemimpin mereka.²⁶

Akan tetapi ada beberapa jabatan yang dibolehkan untuk non-Muslim mendudukinya. Yang mana jabatan-jabatan yang terbuka lebih kepada kriteria kecakapan, baik untuk kaum muslim dan non-Muslim akan mempunyai kesempatan yang sama, dan orang yang paling cakaplah yang akan selalu dipilih tanpa diskriminasi apapun.²⁷

Sebagai prinsip umum, semua jabatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan-kebijakan negara dan pengendalian atas semua departemen yang penting harus diperlakukan sebagai posisi-posisi penting, yang mana diberikan kepada orang-orang yang memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada ideologinya dan mampu menyelenggarakannya sesuai

²⁵ Ibid, 124.

²⁶ Ibid, 125.

²⁷ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1995), 321.

dengan isi dan jiwa ideologinya itu sendiri.²⁸ Sementara itu untuk posisi-posisi diluar itu, maka diperbolehkan dan terbuka untuk kaum *dzimmiy* (non-Muslim).

B. Teori Identitas Sosial

Identitas dalam buku H.A.R Tilaar yang berjudul “Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa” menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat konsep yang berkembang tentang identitas:

1. Identitas berarti identik dengan yang lain. Mengarah pada adanya kesamaan antara individu dengan individu lainnya.
2. Identitas berarti menjadi diri sendiri, dilahirkan sebagai suatu individu yang memiliki jiwa sendiri yang berhubungan dengan proses kemerdekaan.
3. Identitas berarti menjadi identik dengan suatu ide. Ide dalam hal ini adalah transendental, dan ide yang melepaskan kekuasaan individu.
4. Identitas berarti individu yang realistis yang hidup bersama dengan individu lainnya.

Yang mana berarti hanya menjadi diri sendiri yang tidak terlepas dari lingkungan budaya ataupun lingkungan alamiah, maka jika dikonsepsikan urutan dari hirarki identitas berdasarkan sifatnya yakni dimulai dari identitas individu

²⁸ Ibid, 322.

dan berkembang menjadi identitas etnis kemudian menjadi identitas nasional atau bangsa.

1. Pengertian Identitas Sosial

Teori Identitas sosial merupakan sebuah analisa psikologi sosial analisis psikologi sosial mengenai proses pembentukan konsep diri dalam konteks keanggotaan kelompok, proses-proses yang berlangsung dalam kelompok, dan hubungan-hubungan yang terjadi antarkelompok. Dalam pendekatan ini, perilaku kolektif dapat dipahami dengan merujuk atau ditentukan oleh seperangkat nilai, aturan, atribut, atau pola perilaku yang berkembang serta terbagikan secara kolektif dalam sebuah kelompok.²⁹

Dalam perspektif teori ini, perilaku individu muncul dan ditentukan dari identifikasi diri sebagai bagian dari kelompok yang menaunginya. Dengan demikian, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada di dalam kelompok melalui mana dia secara sengaja menginternalisasikan nilai-nilai, turut berpartisipasi, serta mengembangkan rasa peduli dan kebanggaan terhadap kelompoknya.

Menurut Hogg apa yang disebut kelompok adalah sebuah unit sosial yang lahir dari aktivitas sejumlah individu yang secara sengaja dan kolektif saling berbagi atribut-atribut yang sama dalam rangka membedakan diri

²⁹ Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015), 2.

mereka dengan individu-individu yang lain.³⁰ Dari situ kemudian berkembang isu-isu utama yang perhatian teori ini seperti prasangka, diskriminasi, etnosentrisme, stereotip, konflik antarkelompok, konformitas, perilaku-perilaku normative, polarisasi kelompok, perilaku kerumunan, kelompok, dan lain-lain.³¹

Menurut Turner dan Myers, individu dalam kehidupannya akan selalu mengidentifikasikan dan mendefinisikan dirinya berdasarkan kelompok sosialnya sehingga terbentuknya identitas sosialnya.³² Dalam kehidupan sosial, masyarakat terdiri dari kategori sosial yang berdiri dalam kekuasaan dan status hubungan satu sama lain. Kategori sosial sendiri mengacu pada pembagian masyarakat atas dasar kebangsaan, ras, kelas, pekerjaan, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.³³

Identitas sosial merupakan atribut yang dimiliki oleh seorang individu dimana individu tersebut merupakan bagian dari suatu kelompok sosial, atribut tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Semua anggota dalam suatu kelompok mempunyai rasa kedekatan atau karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya. Kedekatannya ini bukan

³⁰ Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015), 2.

³¹ Ibid, 3.

³² Retno Pandan Arum Kusumowardhani, dkk, "Identitas Sosial, Fundamentalisme, dan Prasangka terhadap Pemeluk Agama yang Berbeda", *HARMONI : Konflik Dan Dominasi Budaya Dalam Masyarakat Plural*, Vol. 12, No. 1 (Januari – April, 2013), 22.

³³ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar : Edisi Baru Ketiga 1987*, (Jakarta : Rajawali, 1987), 92.

hanya dari kedekatan fisik tapi juga dari kedekatan psikologis, dimana para anggota dalam suatu kelompok mempunyai tujuan dan pemikiran yang sama.

2. Syarat-Syarat Pembentukan Identitas Sosial

Tidak semua kelompok dinamakan kelompok sosial, adapun beberapa persyaratan agar suatu bisa disebut kelompok sosial, diantaranya:³⁴

1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
2. Ada hubungan timbal-balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, dalam kelompok itu.
3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain.
4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.

Teori Identitas kelompok lebih banyak didasari oleh antropologi yang menggunakan ciri-ciri etnik untuk menentukan identitas berbagai kelompok.

³⁴ Ibid, 103.

Identitas juga bisa dikatakan sebagai sebuah proses pemberian label atau nama, atau semacam sesuatu yang bersifat khas.³⁵

Menurut Martin dan Hewstone, orang lebih suka menyesuaikan diri dengan perilaku kelompok bila mereka menganggap anggota kelompok itu benar dan apabila mereka ingin disukai oleh anggota kelompok. Secara psikologis, kesetiaan dan kepatuhan pada kelompok, perasaan senasih dan sepenanggungan disebut konformitas. Konformitas ini muncul karena adanya kesamaan minat, nilai dan norma yang dianut oleh anggota kelompok, serta adanya interaksi yang terus menerus dalam suatu kelompok tertentu.³⁶

Dalam konsep identitas sosial, terdapat tiga jenis model pembentukan identitas sosial, yaitu model kategorisasi diri, perbandingan sosial dan interaksi. Model kategorisasi diri menurut Cameron merupakan kesadaran terhadap keanggotaan dalam kelompok yang dapat digunakan untuk membedakan satu individu dengan individu lain dari kelompok yang

³⁵ Lusi Andriyani, "Identitas Politik dan Politik Identitas : Sebuah Kajian Teoritis", *KALAMSIASI: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 3No. 1 (Maret, 2010), 82.

³⁶ Utami dan Silalahi, "Hubungan Antara Identitas Sosial Dan Konformitas Pada Anggota Komunitas Virtual Kaskus Regional Depok", *Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, & Teknik Sipil) Universitas Gunadarma*, Vol. 5 (Oktober 2013), 93.

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH7pXlsJnVAhVGV7wKHW6dC3cQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.gunadarma.ac.id%2Findex.php%2Fpesat%2Farticle%2Fdownload%2F954%2F836&u sg=AFQjCNG8b9WVKrWZVeLoYTxu2dTG3GWv6A>

berbeda³⁷. Ketika kategorisasi diri berlangsung, individu cenderung akan menempatkan tujuan-tujuan dan kepentingan kelompoknya lebih tinggi dibanding tujuan-tujuan dan kepentingannya sendiri. Dalam kategorisasi diri menyebutkan proses ini sebagai *stereotyping*, individu-individu dalam kelompok cenderung akan mempersepsi diri mereka secara lebih positif dan menunjukkan sikap yang sebaliknya untuk anggota kelompok lain.

Menurut Hogg dan Reid mengartikulasikan peran norma dalam perspektif identitas sosial sebagai dasar untuk sejumlah fenomena komunikatif yang nyata, menjelaskan bagaimana norma kelompok yang direpresentasikan sebagai kognitif tergantung pada konteks prototipe yang menangkap sifat khas kelompok. Proses yang sama yang mengatur arti penting psikologis prototype yang berbeda, dan dengan demikian menghasilkan perilaku normatif.³⁸

³⁷ Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015), 2.

³⁸ *Ibid*, 2.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK

A. Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Berdirinya NU

Nahdlatul Ulama (NU) adalah *Jam'iyah Diniyah al-ijtima'iyah* (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) yang didirikan oleh para kyai pengasuh pesantren. Pada awal berdiri, posisi Rais Akbar dijabat oleh Hadratus Syeikh K.H. M. Hasyim Asy'ari, Katib Aam dijabat oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah, Ketua Umum Tanfidziyah dijabat oleh H. Hasan Gipo dan Sekjen M. Shidiq Judodowirjo.¹

Sejarah proses lahirnya NU bermula karena pada abad 16-17 para ulama banyak sekali yang melakukan hubungan surat menyurat dengan ulama di Saudi Arabia, mengundang ulama India dan negeri-negeri arab dengan membawa buku-buku tafsir, fiqh, dan lain-lain.² Pada abad ke-19, pesantren-pesantren di Jawa melahirkan ulama-ulama yang mempunyai tarap Internasional dan menjadi guru besar dalam pengembangan dan pelestarian Islam di Jawa, diantaranya Syeikh Nawawi al-Bantani (Banten),

¹ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007), 3.

² Ridwan, *Paradigma Politik NU; Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 172.

Syeikh Mahfudz al-Termasi (Termas Pacitan), Syeikh Ahmad Khatib Sambas (Kalimantan) dan Kyai Khalil Bangkalan.

Generasi berikutnya yang merupakan murid langsung dari mereka adalah K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Abdul Wahhab Hasbullah dan K.H. Bisri Sansuri yang belajar di Makkah, pada saat itu ide Muhammad 'Abduh dan paham wahabi yang mana mengajak agar umat Islam bangkit dan meninggalkan kaitannya dengan garis pemikiran mazhab yang empat.³ Ketiga tokoh tersebut tidak menutup diri untuk meninggalkan praktek-praktek keagamaan yang berbau syirik, akan tetapi tidak setuju kalau semua praktek keagamaan waktu itu dinyatakan salah atau bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, dan juga menolak untuk meninggalkan madzab.⁴

Sekembalinya dari Makkah, K.H. Abdul Wahhab Hasbullah membentuk forum diskusi dengan nama *Tashwir al-Afkar*,⁵ yang didirikan di Surabaya pada tahun 1914 bersama Mas Mansur, dengan tujuan untuk membina kontak intelektual dengan tokoh muda mengenai berbagai aspek kehidupan, baik agama sampai masalah politik perjuangan melawan penjajah. Setelah itu terbentuklah kelompok kerja yang diberi nama *Nahdlatul al-Wathan* (kebangkitan tanah air) dengan program utama

³ Ibid, 173.

⁴ Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*, (Yogyakarta : LKiS, 1999), 9.

⁵ Choirul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor*, (Surabaya: Majalah Nahdlatul Ulama AULA, 1990), 2.

dibidang pendidikan. Dan akhirnya berdirilah beberapa madrasah-madrasah di Surabaya.⁶

Perkembangan pemikiran keagamaan dan politik kala itu melatarbelakangi berdirinya NU. Berawal dari berhasilnya Abdul Aziz Saud yang berpaham Wahabi menaklukan Raja Hijaz yang berpaham Sunni, kabar bahwa pemerintahannya akan melarang semua bentuk amaliah yang menggunakan sistem bermadzab diseluruh wilayah kekuasaannya. Ibnu Saud juga berencana menggelar Muktamar Khalifah di Makkah sebagai penerus Daulah Islamiyah yang terputus di Turki.⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang diundang dalam Muktamar tersebut. Awalnya, utusan yang direkomendasikan untuk hadir adalah HOS Tjokroaminoto (SI), KH. Mas Mansur (Muhammadiyah) dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah (pesantren), akan tetapi nama K.H Abdul Wahab Hasbullah dicoret dari daftar calon utusan dengan alasan karena beliau tidak mewakili organisasi resmi.

Peristiwa pencoretan nama K.H. Abdul Wahab Hasbullah inilah yang memunculkan kesadaran para ulama akan pentingnya sebuah organisasi resmi. Dengan dicoretinya nama K.H Abdul Wahab Habullah

⁶ Ibid, 175.

⁷ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aswajah An-Nahdliyah: Ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jamaah yang berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2007), 3.

maka tidak ada yang bisa diamanatkan untuk menyampaikan sikap keberatan atas kebijakan raja yang anti kebebasan bermadzab, anti maulid nabi, anti ziarah makam, dan lain sebagainya. Para kyai di Indonesia menganggap pembaruan adalah suatu keharusan untuk menuju ajaran Islam yang murni, akan tetapi K.H Hasyim Asy'ari tidak setuju apabila umat Islam harus melepaskan sistem bermadzab, karena dengan sistem bermadzab dinilai sebagai tangga menuju kesempurnaan Islam.⁸

Dengan demikian para ulama pesantren membentuk sebuah komite yang disebut Komite Hijaz, dan mengutus tiga orang untuk mewakili mereka menghadap Raja di Makkah.⁹ Mereka adalah Syeikh Ghonaim Al-Misri, K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Dahlan Abdul Qohar.¹⁰ Dengan Komite Hijaz, usaha para ulama pun berhasil, mereka diterima dengan baik dan sikap keberatan yang disampaikan para ketiga utusan itu pun didengarkan oleh Raja. Seluruh umat Islam diperbolehkan beramaliah sesuai dengan keyakinannya, ajaran bermadzab pun tidak dilarang.¹¹ Setelah para utusan pulang dari Makkah, para ulama pun sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi bernama Nahdlatul Ulama atau NU, mengingat pentingnya organisasi resmi dari pengalaman dicoretnya Nama

⁸ Ibid, 4.

⁹ Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*, (Yogyakarta : LKiS, 1999), 11.

¹⁰ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007), 5.

¹¹ Ibid, 5.

K.H. Abdul Wahab Hasbullah dari daftar calon utusan. Nahdlatul Ulama sendiri berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.

Secara garis besar didirikannya Nahdlatul Ulama memiliki beberapa tujuan:¹² a). Memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlusunnah Waljamaah yang menganut pola madzab empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, b). Mempersatukan langkah ulama dan pengikut-pengikutnya, c). Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia, d). Di dalam gerak langkah organisasi ini tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu membangun dan mengembangkan masyarakat agar tetap bertaqwa kepada Allah, serta turut mewujudkan rasa kesetiaan terhadap asas dan tujuan NU yaitu melestarikan dan mengamalkan ajaran Islam dalam menegakkan syariat Islam.

Dengan perkembangan yang pesat, Nahdlatul Ulama memiliki anggota yang sangat banyak dan bisa dibilang besar, yang mana dari hasil survei LSI tahun 2004 menunjukkan bahwa anggota NU tidak kurang dari 60 juta orang. Mereka tersebar di 30 Pengurus Wilayah, 339 Pengurus Cabang, 2.630 Majelis Wakil Cabang dan 37.125 Pengurus Ranting di

¹² Ibid, 5.

seluruh Indonesia. Ditambah 12 Pengurus Cabang Istimewa di luar negeri menurut data dari PBNU tahun 2004.¹³

Usaha-usaha atau Misi Nahdlatul Ulama :

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana diatas, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagaimana berikut:¹⁴

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah dan menurut salah satu madzab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati

¹³ Ibid, 11.

¹⁴ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007), 7.

hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khaira Ummah*.

2. NU dan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi *jam'iyah* (organisasi massa) lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan paham Islam *Ahlu Sunnah Waljama'ah*. Aliran pemikiran *Ahlu Sunnah Waljama'ah* dibidang sosial kemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak *tasamuh* (toleran) dan bersifat *tawasud* (moderat). Prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon berbagai perubahan di lingkungannya, dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural seperti di Indonesia.¹⁵

Dalam merespon perubahan zaman, responsif, akurat dan objektif atas kompleksitas problematika masyarakat bangsa tidak cukup hanya dengan mengandalkan peran kyai (ulama) semata, sudah barang tentu membutuhkan tenaga-tenaga professional muda yang terampil, visibel, dan

¹⁵ Muhammad Shodiq, *Dinamika Kepemimpinan NU: Refleksi Perjalanan K.H Hasyim Muzadi*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004), 42.

kapabel dalam memberikan solusi alternatif yang konseptual dan sistematis. Di sinilah pendirian sebuah organisasi yang independen dan otonom Nahdlatul Ulama menemukan pikiran urgensinya¹⁶.

NU memang mempunyai motivasi untuk mengamalkan dan melaksanakan ajaran Islam, akan tetapi dalam mengantisipasi gejala sosial NU tidak bersikap mutlak-mutlakan. Kewajiban untuk mengamalkan ajaran Islam itu dipenuhi sebatas kemampuan dengan memperhatikan berbagai faktor lain¹⁷. Dasar yang kedua adalah orientasinya dalam melaksanakan kewajiban diukur seberapa jauh dampak positif dan negatifnya. Jika dampak negatif yang lebih besar, maka langkah yang pertama adalah menghindari dampak negatif itu. Karena menurut NU, kewajiban tidak bisa dipaksakan jika pada akhirnya menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak, maka lebih baik untuk memilih yang paling kecil resikonya¹⁸. Motivasi utama yang mendasari langkah NU ialah adanya tertib sosial dan politik, sebab dengan tertib itulah kemungkinan bisa dikembangkan tertib agama.¹⁹

¹⁶ Ibid, 43.

¹⁷ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Di Indonesia : Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Sidoarjo: Al Maktabah, 2011), 8.

¹⁸ Ibid, 9.

¹⁹ Ibid, 10.

3. Tradisi dan Budaya NU

Salah satu ciri yang paling dasar dari Aswaja adalah moderat (*tawassut*) yang artinya adalah jalan tengah. Sikap ini bukan hanya mampu menjaga para pengikut Aswaja dari keterperosokan perilaku yang ekstrem, tapi juga mampu melihat dan menilai fenomena kehidupan secara proporsional. Kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan budaya, dan salah satu karakter budaya adalah perubahan yang terus menerus.²⁰

Sikap *tawasuth* ini diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan *amar ma'ruf nahi munkar* yang mengedepankan kebijakan secara bijak. Yang mana prinsip bagi Aswaja adalah berhasilnya nilai-nilai syari'at Islam dijalankan oleh masyarakat, sedang cara yang dilakukan harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat²¹.

Menghadapi budaya dan tradisi, ajaran Aswaja mengacu kepada salah satu kaidah fiqh "*al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*" yang artinya mempertahankan kebaikan warisan masa lalu dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik. Seseorang harus bisa mengapresiasi hasil-hasil kebaikan yang dibuat orang-orang pendahulu (tradisi yang ada), dan bersikap kreatif mencari berbagai

²⁰ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aswajah An-Nahdliyah: Ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jamaah yang berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2007), 31.

²¹ Ibid, 18

terobosan baru untuk menyempurnakan tradisi tersebut atau menciptakan tradisi baru yang lebih baik²².

4. Struktur dan Perangkat Organisasi NU:

Struktur dalam organisasi NU ini terdiri dari:²³

- a. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat pusat.
- b. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat propinsi.
- c. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kabupaten/kota, dan PCI NU (Pengurus Cabang Istimewa) untuk luar negeri.
- d. MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kecamatan.
- e. PR (Pengurus Ranting) untuk tingkat desa/kelurahan.

Dalam menjalankan programnya NU mempunyai tiga perangkat organisasi:

- a. Badan Otonom (Banom), adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

NU mempunyai 10 Banom, yaitu:²⁴

²² Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aswajah An-Nahdliyah: Ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jamaah yang berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2007), 32.

²³ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007), 8.

1) Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah

Membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat yang mu'tabar di lingkungan NU, serta membina dan mengembangkan seni hadrah.

2) Jam'iyatul Qurra wal Huffazh (JQH)

Melaksanakan kebijakan pada kelompok qari/qariah dan hafizh/hafizhah.

3) Muslimat

Melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan NU.

4) Fatayat

Melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda NU

5) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)

Melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU. GP Ansor sendiri menaungi Banser (Barisan Ansor Serbaguna) yang menjadi salah satu unit bidang garapnya.

6) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)

Melaksanakan kebijakan pada pelajar laki-laki dan santri laki-laki. IPNU menaungi CBP (Corb Brigade Pembangunan) semacam satuan tugas khususnya.

7) Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU)

²⁴ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007), 8.

Melaksanakan kebijakan pada pelajar perempuan dan santri perempuan.

8) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

Membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.

9) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)

Melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan.

10) Pagar Nusa

Melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni beladiri.

b. Lajnah adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. NU mempunyai dua Lajnah, yaitu:²⁵

1) Lajnah Falakiyah

Bertugas mengurus masalah hisab dan rukyah, serta pengembangan ilmu falak.

2) Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN)

Bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku, serta media informasi menurut paham Ahlussunah wal Jama'ah.

²⁵ Ibid, 9.

c. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan, berkaitan dengan suatu bidang tertentu.

NU sendiri mempunyai 14 lembaga, yaitu:²⁶

- 1) Lembaga Dakwah (LDNU). Yang mana melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlulsunah Wal Jamaah.
- 2) Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU). Yang melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
- 3) Rabithat Ma'ahid al Islamiyah (RMI). Melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan pondok pesantren.
- 4) Lembaga Perekonomian (LPNU). Yang melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga.
- 5) Lembaga Pengembangan Pertanian (LP2NU). Yang melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.
- 6) Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKKNU). Yang melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan.

²⁶ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007), 10.

- 7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam). Yang melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
- 8) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBHNU). Yang melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum.
- 9) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, disingkat Lesbumi. Yang melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya.
- 10) Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIZNU). Bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasyarufkan zakat, infaq dan shadaqah.
- 11) Lembaga Waqaf dan Pertahanan (LWPNU). Yang mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan, serta harta benda waqaf lainnya milik NU.
- 12) Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Yang membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.
- 13) Lembaga Ta'mir Masjid Indonesia (LTMI). Yang melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
- 14) Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPKNU). Yang melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan.

B. NU JAWA TIMUR

1. Sejarah NU Jawa Timur

Terbentuknya struktur kepengurusan NU di level propinsi berawal dari Konsulat yang bertugas sebagai wakil PBNU dan membina Cabang di daerahnya. Dari 11 Konsulat, 3 diantaranya berada di Jawa Timur, yakni K.H.M. Dahlan yang memimpin Konsulat Pasuruan, H. Iskandar Sulaiman yang memimpin Konsulat Malang, dan K.H. A. Munif yang memimpin Konsulat Madura yang berada di Bangkalan. Pada tahun 1954, Konsul-konsul Jawa Timur mempunyai dua agenda kegiatan yang menyibukkan, yakni Muktamar NU ke-20 di Surabaya dan pemilihan umum HBNO untuk membentuk Panitia Muktamar ke-20, dan Muhammad Nur AGN terpilih sebagai ketua panitia pelaksana.²⁷

Muktamar NU ke-20 NU tahun 1954 di Surabaya mengubah struktur domisili Konsulat Wilayah di Jawa Timur menjadi satu struktur dan diberi nama Majelis Konsul Jawa Timur. Yang di dalamnya terdapat struktur keanggotaan yakni Ketua Konsul, Sekretaris, Bendahara, Pembantu bidang Dakwah, urusan Ma'arif, Mabarot, Muslimat, Pertanian, dan Perekonomian. Majelis Konsul Jawa Timur sendiri dipimpin oleh K.H. Mahfudh Syamsul Hadi, didampingi sekretaris Umar Burhan.

²⁷ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007), 13.

Setelah pemilihan umum, NU Jawa Timur mendapatkan 70 persen kursi di DPRD Tk I yang berjumlah 70, sehingga ketua DPRD Tk 1 saat itu dijabat oleh Ahmad Thohir Hadiwidjaja yang merupakan tokoh NU dari cabang Sampang, dan pada masa beliau menjabat ia berusaha mendapatkan rumah di Jl. Raya Darmo 96 sebagai Kantor NU Jawa Timur, setelah konsultasi kepada pihak Komandan Militer Kota Besar (KMKB) sebagai pemegang kuasa. Pada tahun 1956, Majelis Konsul menyelenggarakan konferensi di Ponorogo, untuk menyesuaikan beberapa peristilahan dan tugas-tugas pengurus Muktamar ke-20. Di samping untuk membicarakan perolehan kursi dalam pemilu yang cukup dominan; khususnya bagi NU Jawa Timur.²⁸

Akhirnya diumumkanlah perubahan dan stempel, bahwa Konsulat PB Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur berubah menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dengan ditandatangani surat nomor 224/A/Tanf/PW/III-57 oleh Penulis II Abdul Hadi Chamdun pada tanggal 18 Maret 1957. Usaha mendapatkan kunci rumah di Jl. Raya Darmo 96 akhirnya bisa terealisasikan oleh H. Hadi Chamdun, H.M Said dan Ahmad Thohir Hadiwidjaja, dan diresmikanlah rumah tersebut sebagai Kantor PWNU Jawa Timur.

²⁸ Ibid, 14.

Setelah usaha untuk mendapatkan kantor terealisasi dibentuklah susunan kepengurusan PWNU Jawa Timur dalam konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang pertama. Susunan kepengurusan tersebut terdiri dari jabatan Rais dipangku oleh K.H Mahrus Ali, Wakil Rais oleh K.H. Ridwan Abdullah, Ketua Tanfidziah oleh K.H. Mahfudz Syamsul Hadi, Wakil Ketua I oleh A Tahlim Hadi Suprpto, Wakil Ketua II oleh Umar Burhan, Sekretaris oleh H. Muhammad Saleh, dan Wakil Sekretaris oleh Abdul Hadi Chamdun.²⁹

Selama empat puluh delapan tahun kantor PWNU Jawa Timur bertempat di Jalan Raya Darmo 96 Surabaya, akan tetapi karena perkembangan tata ruang kota Surabaya yang semakin tidak memungkinkan dan arena semakin banyaknya Lembaga dan Banom yang dimiliki menjadikan kantor menjadi semakin sesak, akhirnya kantor PWNU Jawa Timur dipindahkan ke jalan Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya hingga saat ini. Dan semakin berkembangnya NU Jawa, kini jumlah warga NU di Jawa Timur sekitar 23 jiwa. Mereka tersebar di 44 Pengurus Cabang, 676 Majelis Wakil Cabang, dan 9.552 Ranting yang ada di 38 kabupaten/kota di seluruh Jawa timur, termasuk dipulau-pulau terpencil.

²⁹ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007), 15.

PWNU Jawa Timur seringkali menjadi rujukan penentuan sikap oleh PWNU-PWNU lain, terlebih dalam masa muktamar dan penentuan hari raya, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.³⁰ PWNU Jawa Timur juga seringkali dijadikan barometer gerakan NU secara nasional. Beberapa kali digelar Istighosah Akbar NU secara besar-besaran di daerah ini dengan mendatangkan jutaan massa.

Para kyai nusantara kebanyakan pernah belajar di pesantren-pesantren besar di Jawa Timur, sehingga ikatan batin mereka dengan Jawa Timur senantiasa tetap terjaga. PWNU Jawa Timur juga menjadi basis pengembangan pencak silat Pagar Nusa. Selain karena warganya banyak yang berasal dari daerah ini, kantor pusatnya juga masih berkedudukan di Jawa Timur.³¹

2. Visi dan Misi PWNU Jawa Timur :³²

Visi : Terwujudnya sebuah organisasi sosial keagamaan yang kokoh dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi jam'iyah dengan bersikap moderat dan penuh kreativitas dalam merespon persoalan-persoalan agama, masyarakat dan berdasarkan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

³⁰ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007),16.

³¹ Ibid, 17.

³² Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007), 12.

Misi :

- a. Melakukan konsolidasi dan mengembangkan manajemen organisasi.
- b. Meningkatkan peran-peran sosial keagamaan berupa gagasan dan reson terhadap persoalan agama, masyarakat dan bangsa.
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan dan teknologi.

3. Susunan Pengurus PWNU Jawa Timur**SUSUNAN PENGURUS PWNU JAWA TIMUR****TANFIDZIYAH****Masa Khidmat 2013 – 2018****Ketua :** KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM

Wakil Ketua :

1. KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI
2. Prof. Dr. H. Shonhaji Sholeh, Dip.IS
3. Drs. Fathul Huda, MM
4. Drs. H. Hamid Syarif, MH
5. KH. Jazuli Nur, Lc
6. Dr. H. Ali Mas'ud Kholqillah, M.Ag.,M.PdI
7. Drs. H. M. Shidik AR

2. H. Rasidi
3. Ir. Muhammad Qoderi, MT
4. Drs. H. Muhammad Thoyyibun Muslim
5. Drs. H. Ahsanul Haq, M.PdI

C. GERAKAN PEMUDA ANSOR

1. Sejarah berdiri Gerakan Pemuda Ansor

Kelahiran Ansor tidak lepas dari perkembangan Nahdlatul Wathan, semakin bertambahnya para pemuda yang dikursus oleh Nahdlatul Wathan membuahakan pemikiran untuk menyatukan para pemuda itu dalam satu wadah. Karena pada masa itu juga banyak sekali bermunculan organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan lain-lain.³³ Tujuan adanya gagasan untuk membentuk organisasi pemuda adalah untuk mempererat hubungan diantara mereka dan juga mendidik para pemuda untuk memiliki kecintaan terhadap Tanah Air.³⁴

Namun pada saat itu terdapat konflik internal di dalam tubuh Nahdlatul Wathan, yakni adanya perbedaan anstara tokoh tradisional dan tokoh modernis. Pada saat semangat untuk mendirikan organisasi

³³ Choirul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor*, (Surabaya: Majalah Nahdlatul Ulama AULA, 1990), 4.

³⁴ Erwin Kusuma, *Yang Muda Yang Berkiprah; Gerakan Pemuda Ansor dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal hingga Massa Reformasi (1950-2010)*, (Bogor; Kekas Press, 2012), 18.

kepemudaan Islam di dalam wadah NU, K.H. Abdul Wahab Hasbullah (yang kemudian dikenal sebagai bapak pendiri NU) yang merupakan tokoh tradisional dan K.H. Mas Mansyur (yang kemudian dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah) yang berhaluan modernis mempunyai perbedaan pandangan perihal *tahlil, talqin, taqlid, ijtihad, madzab*, dan masalah *furu'iyah* lainnya, akhirnya keduanya menempuh arus gerakan yang berbeda.³⁵

Meskipun terdapat perbedaan, namun semangat untuk mendirikan organisasi pemuda tetap membara. Terbukti dari diadakannya rapat gabungan antara dua kubu tersebut pada tahun 1922, guna membahas nama organisasi yang mereka cita-citakan tersebut. Kubu K.H Mas Mansur mengusulkan nama *Mardi Santoso*, sedangkan kubu K.H. Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan nama *da'watus syubban*. Rapat pada saat itu berlangsung penuh ketegangan, masing-masing kubu kukuh dengan usulan masing-masing, yang akhirnya rapat pun tidak menghasilkan suatu keputusan apapun. Sampai kemudian K.H Mas Mansur memisahkan diri dan masuk Muhammadiyah.

Dua tahun setelah itu, para pemuda yang mendukung K.H. Abdul Wahab akhirnya membentuk sebuah organisasi pemuda yang diberi nama

³⁵ Choirul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor*, 5.

Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air).³⁶ Organisasi ini didirikan untuk mewadahi potensi pemuda di lingkungan Nahdlatul Wathon (1916) dan Taswirul Afkar (1918).

Syubbanul wathan di pelopori oleh Abdullah Ubaid Ketua, dan Thohir Bakri selaku Wakil Ketua. Organisasi ini aktif mengadakan berbagai kegiatan pengkaderan pemuda dalam bidang agama, sosial dan kebangsaan, juga kegiatan kependuan.³⁷ Sebelum bernama Gerakan Pemuda Ansor, *syubbanul wathan* pernah berganti nama menjadi Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU), Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO) dan yang terakhir menjadi Gerakan Pemuda Ansor.³⁸

Nama Ansor sendiri diilhami atau terinsipasi saat K.H. Abdul Wahab menceritakan tentang kesetiaan para sahabat Al-Hawariyyin dalam menolong perjuangan Nabi Muhammad SAW, terutama ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke kota Yatsrib (Madinah). Dengan pengorbanan lahir maupun batin, mereka tampil sebagai pejuang yang tangguh dalam membela dan membentengi perjuangan Islam. maka kemudia Nabi memberikan nama

³⁶ Ibid, 5.

³⁷ Erwin Kusuma, *Yang Muda Yang Berkiprah; Gerakan Pemuda Ansor dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal hingga Massa Reformasi (1950-2010)*, (Bogor; Kekas Press, 2012), 18.

³⁸ <http://www.ansorjatim.or.id/visi-dan-misi/> (Senin, 26 Juni 2017, 20:50)

penghormatan kepada mereka dengan sebutan Ansor, yang berarti mereka yang menolong.³⁹

Dengan diberikannya nama Ansor tersebut, dimaksudkan agar dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku, dan semangat perjuangan para sahabat Nabi. Gerakan ANO (sebelum disebut GP Ansor) harus memegang teguh komitmen yang senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan, dan membentengi ajaran Islam. Gerakan Pemuda Ansor didirikan secara resmi pada tanggal 26 April 1934, berdasarkan keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-9 yang dilaksanakan di Banyuwangi.⁴⁰

Gerakan Pemuda Ansor sebagai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia memiliki suatu pandangan jauh tentang Ansor kedepan, tujuan-tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sekaligus hal-hal yang harus dikerjakaan untuk mewujudkannya.

³⁹ Choirul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor*, (Surabaya: Majalah Nahdlatul Ulama AULA, 1990), 19.

⁴⁰ Erwin Kusuma, *Yang Muda Yang Berkiprah; Gerakan Pemuda Ansor dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal hingga Massa Reformasi (1950-2010)*, (Bogor; Kekas Press, 2012), 20.

2. Visi dan Misi GP Ansor

Visi dari GP Ansor adalah merevitalisasi nilai dan tradisi, penguatan sistem kaderisasi, pemberdayaan potensi kader, dan kemandirian ekonomi. Adapun misi Gp Ansor adalah menginternalisasi nilai ASWAJA dan sifat Rasul dalam Gerakan Pemuda Ansor, membangun disiplin organisasi dan kaderisasi berbasis profesi, dan menjadi sentrum lalulintas informasi dan peluang usaha antar kader dengan stakeholder.

Adapun tujuan dibentuknya Gerakan Pemuda Ansor adalah; pertama, membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih. Kedua, menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menempuh manhaj salah satu madzhab empat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ketiga, berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi Allah SWT.

3. Susunan Kepengurusan GP Ansor Jawa Timur

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN WILAYAH GERAKAN PEMUDA ANSOR

PROPINSI JAWA TIMUR

Masa Khidmat 2013-2017

PENGURUS HARIAN

Ketua	:	H. RUDI TRI WAHID S.Ag
Wakil Ketua	:	ABDUSSALAM
Wakil Ketua	:	HENDRI DEWANTO
Wakil Ketua	:	Dr. UMAR USMAN
Wakil Ketua	:	ABDUSSALAM SHOHIB
Wakil Ketua	:	HM. SHOLACHUL 'AM NOTOBUWONO, SE.
Wakil Ketua	:	BADRUD TAMAM
Wakil Ketua	:	KHOIRUL HUDA, S.Ag.
Wakil Ketua	:	SUNAN FANANI, S.Ag, M.PdI.
Wakil Ketua	:	GATOT CAHYO BASKORO
Wakil Ketua	:	H. ABDURROCHIM
Wakil Ketua	:	MIFTAHUL HUDA
Wakil Ketua	:	ZAINUL ARIFIN
Wakil Ketua	:	HM. BASHORI, M.Si.
Sekretaris	:	AHMAD TAMIM
Wakil Sekretaris	:	SYUKRON DOSI, SS., M.Ag
Wakil Sekretaris	:	MUH. SHOLIHUDDIN, S.Ag, M.Ag.

Wakil Sekretaris	:	H. SYAFIEQ SAUKI, LC.
Wakil Sekretaris	:	MUZAWIR SYAFIK
Wakil Sekretaris	:	ILHAM WAHYUDI, Sey
Wakil Sekretaris	:	H. JUNIDIAN MUHAMMAD HASAN, SE.
Wakil Sekretaris	:	FAIRUZ HUDA
Wakil Sekretaris	:	ABDUL GHOFUR, ST.
Wakil Sekretaris	:	NUR AMINUDDIN SAM
Wakil Sekretaris	:	MUHAMMAD HASAN BASRI
Wakil Sekretaris	:	HABIBULLAH MACHSUM
Wakil Sekretaris	:	ABID UMAR
Wakil Sekretaris	:	SYAMSUL WATHONI
Bendahara	:	SUPAI M NOR, ST., MM.
Wakil Bendahara	:	ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.
Wakil Bendahara	:	MUHAMMAD AGUS ALFIAN
Wakil Bendahara	:	NURI MAULUDIN ZUHRI
Wakil Bendahara	:	AFNAN HIDAYAT
Wakil Bendahara	:	WALADI KATMI
Wakil Bendahara	:	AAN AINUR ROFIQ

DEWAN PENASEHAT

Ketua	:	KH. AGOES ALI MASYHURI
Wakil Ketua	:	HASAN AMINUDIN
Wakil Ketua	:	H. ALFA ISNAENI
Sekretaris	:	Drs. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Anggota	:	1. HALIM ISKANDAR

2. H. AMIN SAHID HUSNI
3. H. TAUFIKURRAHMAN HASAN
4. Prof. Dr. MUHAMMAD HASAN
5. H. FATCHUL HUDA
6. H. MUHIBBIN ZUHRI
7. H. MH ROFIQ
8. Prof. BABUN SUHARTO

D. Diskursus Wacana Pemimpin Non-Muslim

Wacana mengenai pemimpin non-muslim sebenarnya telah lama menjadi perbincangan dan bahan diskusi di Indonesia. Dimulai dari tahun 1945 pada sidang kedua BPUPKI (Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Pada saat itu golongan Islam menginginkan bentuk negara Islam dan syarat pemimpin/presiden harus beragama Islam, yang mana hal itu ditentang oleh golongan Nasionalis. Akhirnya setelah adanya kompromi alot tersebut, di sepakatilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pada tahun 2014 persoalan pemimpin non-Muslim kembali muncul ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat Basuki Tjahya Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur, menjadi Gubernur kota DKI Jakarta, untuk menggantikan Joko

Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur. Penggantian ini karena Joko Widodo telah menjabat sebagai presiden Indonesia yang ke-7.⁴¹

Beberapa kelompok masyarakat ada yang tidak setuju dengan keputusan diangkatnya Ahok sebagai Gubernur dengan melakukan penolakan-penolakan. Penolakan terhadap Ahok diantaranya dilatar belakangi karena faktor teologis, yakni adanya perbedaan keyakinan (agama) antara Ahok dan mayoritas masarakat Indonesia. Seperti halnya organisasi keagamaan FPI yang juga menolak Ahok, Ahok yang beretnis Tionghoa dinilai melakukan diskriminasi terhadap umat Islam. Muchsin Al Athlas yang pada saat itu menjabat sebagai ketua umum FPI memberikan alasan bahwa penolakan terhadap Ahok adalah karena dasar masalah teologi akidah yang mana mengharamkan menunjuk pemimpin dari kalangan Non-Muslim.⁴²

Persoalan wacana pemimpin non-Muslim mulai menjadi perdebatan kembali pada pertengahan tahun 2016 hingga 2017 ini. Kontroversi bermula ketika Basuki Tjahaja Purnama muncul kembali sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, dan membuat masyarakat mulai memperdebatkan lagi tentang boleh tidaknya non-Muslim menjadi seorang pemimpin.

⁴¹ Andyala Waluyo, “Presiden Jokowi Lantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta” <https://www.voaindonesia.com/a/presidenokowiantik-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2526024.html> (Minggu, 02 Juli 2017, 10:22)

⁴² Wawancara LIVE ketua FPI, Alasan Benci AHOK (Non Muslim dilarang pimpin Indonesia), dalam berita TVOne, <https://www.youtube.com/watch?v=2EOWFIRb74U>, (Sabtu, 24 Juni 2017, 20:18)

Kontroversi ini memunculkan adanya pihak pro dan kontra tentang pencalonan Ahok, pihak yang pro Ahok seperti halnya pendukungnya tetaplah mendukung pencalonan Ahok sebagai Gubernur, berbeda dengan pihak yang kontra seperti halnya FPI, HTI dan ormas lainnya yang tidak setuju dan menentang Ahok.⁴³

Dari kalangan partai seperti sejumlah pengurus DPP, DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-DKI Jakarta dari kubu M Romahurmuzy dan Djan Faridz bersatu menolak keputusan kedua ketua umum partai dalam memberikan dukungan kepada pasangan cagub Ahok-Djarot, yang mana sebelumnya ketua umum PPP Djan Faridz menyebutkan bahwa memberikan dukungannya terhadap Ahok.

Bachtiar Chamsyah selaku senior sekaligus Majelis Tinggi PPP kubu Romy menjelaskan alasan penolakan tersebut adalah karena bertentangan dan menyalahi azas partai Islam, yang mana azas PPP adalah Islam maka siapapun yang dipilih harus Muslim. Jadi menurut Bachtiar PPP seharusnya menetapkan dan memilih calon sesuai dengan agamanya.⁴⁴ Selain alasan perbedaan agama, yang menjadikan konflik menjadi sangat besar adalah karena penistaan agama yang dilakukan Ahok mengenai surat Al-Maidah ayat 51.

⁴³ Aries Setiawan, Alasan FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur Jakarta, metro viva <http://m.viva.co.id/berita/metro/541332-alasan-fpi-tolak-ahok-jadi-gubernur-jakarta> (Kamis, 1 Juni 2017, 07:45)

⁴⁴ Abdul Qodir, PPP Romy dan Djan Faridz Bersatu Tolak Dukung Ahok-Djarot, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/04/15/ppp-romy-dan-djan-faridz-bersatu-tolak-dukung-ahok-djarot?page=all> (Kamis, 29 Juni 2017, 13:20)

Dari kalangan NU, seperti halnya KH. Sholahudin Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Sholah, juga memberikan tanggapan terkait pencalonan Ahok. Beliau menganggap bahwa warga NU yang masih mendukung Ahok itu merupakan hak pribadi masing-masing, akan tetapi beliau menghimbau agar berfikir ulang. Gus Sholah pun menyatakan bahwa beliau merasa senang karena KH. Ma'ruf Amin telah menyampaikan hasil Muktamar NU pada tahun 1999 yang melarang warga NU memilih pemimpin non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat. dan hal tersebut merupakan suatu penegasan dari tokoh NU yang seharusnya diikuti oleh seluruh warga Nahdliyin.⁴⁵

NU memandang pemimpin sebagai penguasa tertinggi dalam 3 bidang hal sekaligus: yakni bidang administrasi, panglima angkatan bersenjata, dan pengatur bidang agama⁴⁶. NU pernah membahas hal tersebut dalam Muktamar NU tahun 1999 di Lirboyo. Hasil dari Muktamar tersebut menyatakan bahwa orang Islam tidak boleh menguasai urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu:

1. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung karena faktor kemampuan.

⁴⁵ Mukhtar Bagus, "Gus Sholah: Bagi Warga Jakarta yang Memilih Ahok, Pikir Ulang" <http://news.okezone.com/read/2017/02/03/337/1609170/gus-sholah-bagi-warga-jakarta-yang-memilih-ahok-pikir-ulang> (Jum'at, 30 Juni 2017, 07:22)

⁴⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Prespektif Politik Islam dan Relefansinya dalam Konteks Indonesia* (Jakarta : Sinar Harapan, 2006), 4.

tentang kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai landasan pemikirannya terhadap wacana pemimpin non-Muslim. Hal ini terlihat dari pemikiran tokoh PW NU dan GP Ansor yang tidak secara mutlak mensyaratkan semua pejabat di semua lini pemerintahan harus beragama Islam. Adanya pengecualian atas dasar kemaslahatan ini merupakan internalisasi tokoh PWNU dan GP Ansor terhadap nilai-nilai yang menjadi landasan pemikiran NU. Nilai-nilai tersebut adalah adanya prinsip keagamaan NU di bidang sosial kemasyarakatan yang bercorak *tasamuh* (toleran) dan *tawasuth* (moderat) untuk merespon perubahan dan berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural di Indonesia.

Dengan demikian, di luar jabatan-jabatan inti yang mana mempunyai hak untuk membuat kebijakan, maka dibolehkan untuk diisi atau diberikan kepada non-Muslim apabila memenuhi syarat-syarat darurat seperti yang disebutkan di atas meskipun agama Islam merupakan mayoritas di Indonesia. Toleransi yang diberikan oleh tokoh PWNU ini berdasar pada prinsip orientasi dalam melaksanakan kewajiban yang diukur seberapa jauh dampak positif dan negatifnya.

Seperti yang tercermin dalam syarat darurat tersebut bahwa apabila terdapat seorang muslim yang memiliki kompetensi tetapi ada indikasi berkhianat, maka dibolehkan memilih non-Muslim. Hal ini karena NU juga mempunyai orientasi pemikiran bahwa kewajiban tidak bisa dipaksakan jika pada akhirnya menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak. Dengan hal

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa pengertian pemimpin menurut tokoh PW NU Jawa Timur adalah orang yang mengatur masyarakat yang ia pimpin dengan berlandaskan syari'at dalam jalan Allah untuk mendapatkan ridho-Nya, yakni dengan yaitu melestarikan dan mengamalkan ajaran Islam dalam menegakkan syariat Islam. Sedangkan pengertian menurut tokoh GP Ansor Adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain (orang yang dipimpin) sehingga orang lain tersebut melakukan sesuai yang dikehendaki oleh seorang pemimpin, yakni untuk diarahkan kepada kebaikan dan kesejahteraan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Menurut tokoh PW NU dan tokoh GP Ansor mengangkat pemimpin adalah sesuatu yang wajib hukumnya, dan suatu keharusan untuk mengangkat seorang pemimpin, melihat posisi penting seorang pemimpin dalam kehidupan, yakni sebagai seseorang yang mengarahkan dan mengkoordinir potensi masyarakat yang berbeda-beda sehingga suatu integritas yang kuat untuk terciptanya tujuan bersama.

2. Adapun syarat-syarat seorang pemimpin menurut tokoh PW NU dan PW GP Ansor Jawa Timur adalah harus seseorang yang meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad S.A.W, dan kepemimpinannya merupakan pencerminan karakter Rasulullah dalam menjalankan tugasnya sebagai umat. Sifat-sifat wajib Rasul diantaranya adalah Shiddiq (benar), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathanah (cerdas).
3. Mengenai wacana pemimpin non-Muslim, tokoh PW NU dan GP Ansor berpendapat bahwa dalam agama seorang pemimpin haruslah seorang Muslim, akan tetapi non-Muslim diperbolehkan untuk mengisi jabatan-jabatan teknis/pelaksana, yang mana tidak mempunyai hak untuk membuat suatu kebijakan. Mengacu pada hasil Mukhtamar tahun 1999, keadaan darurat adalah apabila dalam suatu bidang tertentu tidak bisa dikerjakan oleh orang Muslim secara langsung, apabila ada seorang Muslim yang berkemampuan akan tetapi punya track record yang mempunyai indikasi untuk berkhianat, dan apabila penguasaan kepada non-Muslim tersebut memberikan manfaat. Adapun tambahan keadaan darurat yang membolehkan non-Muslim mengisi jabatan pembuat kebijakan (seperti gubernur, bupati, dan lainnya) adalah apabila disuatu wilayah tersebut memang mayoritas masyarakatnya adalah non-Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung : Mizan, 1995.
- Afif, Afthonul. *Teori Identitas Sosial*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015.
- Al Mawardi. *Al Ahkam As Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta : Darul Falah, 2006.
- Anam, Choirul. *Gerak Langkah Pemuda Ansor*. Surabaya: Majalah Nahdlatul Ulama AULA, 1990.
- Aziz, M. Ali. *Kepemimpinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Harakat Media, 2009.
- Fatimah Djajasudarma. *Wacana : Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*. Bandung: Refita Aditama, 2006.
- Feillard, Andree. *NU Vis-a-Vis Negara*. Yogyakarta : LKiS, 1999.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam Di Indonesia : Pendekatan Fikih dalam Politik*. Sidoarjo: Al Maktabah, 2011.
- Handoyo, Eko. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam, 1999.
- Iqbal, Mohammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Kusuma, Erwin. *Yang Muda Yang Berkiprah; Gerakan Pemuda Ansor dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal hingga Massa Reformasi (1950-2010)*. Bogor; Kekas Press, 2012.
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur. *Aswajah An-Nahdliyah: Ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jamaah yang berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta : Erlangga, 1992.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009.
- Muchtar, Masyhudi dan Mohammad Subhan. *Profil NU Jawa Timur*. Surabaya : Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007.

- Muzadi, Hasyim. *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Jakarta: Logos, 1999.
- Nanang Tahqiq. *Politik Islam*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarstito, 2003.
- Plano, C. Jack. *Kamus Analisa Politik: Cetakan ketiga*, ed. Edi S. Siregar. Jakarta: Rajawali pers, 1994.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode penelitian komunikasi: dilengkapi dengan contoh analisis statistik*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Shodiq, Muhammad. *Dinamika Kepemimpinan NU: Refleksi Perjalanan K.H Hasyim Muzadi*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004.
- Siagian, Sondang. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Aneka Cipta, 1991.
- Siraj, Said Aqil. *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*. Jakarta: LTN NU, 2014.
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar : Edisi baru ketiga 1987*. Jakarta : Rajawali, 1987.
- Sudaryono. *LEADERSHIP: Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta. 2011.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Prespektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 2006.
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1985.
- Thoha, Mifta. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Lusi Andriyani. "Identitas Politik dan Politik Identitas : Sebuah Kajian Teoritis". *KALAMSIASI: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 3No. 1. Surabaya, Maret, 2010.

Retno Pandan Arum Kusumowardhani, dkk, "Identitas Sosial, Fundamentalisme, dan Prasangka terhadap Pemeluk Agama yang Berbeda", *HARMONI : Konflik Dan Dominasi Budaya Dalam Masyarakat Plural*, Vol. 12, No. 1. Surabaya, 22, Januari – April, 2013.

Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22 No. 33. Januari-Juni, 2016.

Wahyu Naldi. "Penafsiran terhadap Ayat-Ayat Larangan memilih pemimpin non-muslim dalam Al-Qur'an; Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Ilham. "Respons Kelompok Muslim Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim (Studi Kasus di Kelurahan Lenteng Agung Periode 2013-2014)" skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, 2015).

Abdul Qodir, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/04/15/ppp-romy-dan-djan-faridz-bersatu-tolak-dukung-ahok-djarot?page=all> "PPP Romy dan Djan Faridz Bersatu Tolak Dukung Ahok-Djarot" (Kamis, 29 Juni 2017).

Akbar Tandjung,
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=728
"Kepemimpinan Politik Yang Negarawan" (Rabu, 10 Juli 2017).

Alhafiz Kurniawan, <http://www.nu.or.id/post/read/63567/memilih-pemimpin-non-muslim-bolehkah> "*Memilih Pemimpin Non-Muslim, Bolehkah?*" (Kamis, 29 Juni 2017).

Andylala Waluyo, <https://www.voaindonesia.com/a/presidenokowiantik-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2526024.html> "Presiden Jokowi Lantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta" (Minggu, 02 Juli 2017).

Aries Setiawan, <http://m.viva.co.id/berita/metro/541332-alasan-fpi-tolak-ahok-jadi-gubernur-jakarta> "Alasan FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur" (Kamis, 1 Juni 2017).

Budriyanto, <http://news.okezone.com/read/2017/02/21/337/1624330/orang-islam-dilarang-pilih-pemimpin-non-muslim-pp-muhamadiyah-tak-langgar-konstitusi> "Orang Islam Dilarang Pilih Pemimpin Non-Muslim, PP Muhammadiyah: Tak Langgar Konstitusi" (Selasa, 13 Juni 2013).

Hartono Hamdani Sutedja, <https://www.harianpublik.com/alvara-research-center-fpi-masuk-tiga-besar-ormas-paling-dikenal-umat-islam.html> "Alvara Research Center: FPI Masuk Tiga Besar Ormas Paling Dikenal Umat Islam", (Kamis, 13 April 2017).

<http://www.ansorjatim.or.id/visi-dan-misi/> (Senin, 26 Juni 2017).

Kementerian Agama, <http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/3WsLxrag1286178904.pdf>
“Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama” (Minggu, 28 Mei 2017).

Mukhtar Bagus, <http://news.okezone.com/read/2017/02/03/337/1609170/gus-sholah-bagi-warga-jakarta-yang-memilih-ahok-pikir-ulang> “Gus Sholah: Bagi Warga Jakarta yang Memilih Ahok, Pikir Ulang” (Jum’at, 30 Juni 2017).

